

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN  
TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**VIONA CANTIKA HERMAN**  
**2010012111178**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No.Reg : 638/pdt/02/VIII-2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**


**No. Reg: 638/Pdt/02/VIII-2024**

Nama : VIONA CANTIKA HERMAN  
NPM : 2010012111178  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM  
OLEH SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN  
PINJAM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH DI KOTA PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. (C) Suamperi S.H, M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

# EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPRASI SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG

Viona Cantika Herman<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [Vionacantika29@gmail.com](mailto:Vionacantika29@gmail.com)

## ABSTRACT

*Based on people's economic principles which are rooted in family values, cooperatives act as drivers of the community's economy by creating employment opportunities. Despite this, there are still many violations in the management of cooperatives, especially savings and loan cooperatives, which hinder the progress of cooperatives and affect public trust in them. Therefore, the problem formulation is: (1) What are the factors that hinder the effectiveness of supervision of savings and loan cooperatives by the supervisory task force of the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Padang City? (2) How to overcome obstacles in order to make effective supervision of savings and loan cooperatives by the supervisory task force of the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Padang City? The type of research used is sociological juridical. Secondary and primary data sources. Data collection techniques are interviews and document research. The data analysis used is qualitative. Investigation conclusions: (1) The Cooperative and SME Service Supervision Task Force carries out supervisory duties by regularly monitoring the development of cooperative activities through improving cooperative management. (2) In carrying out supervision of savings and loan cooperatives in Padang City, the Cooperative and SME Service Supervision Task Force faces various obstacles.*

**Keywords:** *Savings and Loans Cooperatives Supervision, Kooperatif and SME Servis*

## I.PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dijelaskan bahwa: "Pengawas dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Padang terdapat Bidang Pengawasan Koperasi dimana bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan kelembagaan koperasi dan bidang

pengawasan usaha koperasi<sup>1</sup>

Dalam melakukan pengawasan koperasi simpan pinjam di Kota Padang, satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menemui berbagai hambatan diantaranya pengurus koperasi yang tidak menyampaikan Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Satuan Tugas pengawasan Koperasi, beberapa oknum koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi.

Apabila pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap koperasi simpan pinjam berjalan dengan baik, maka diharapkan akan terciptanya suatu koperasi yang sehat dan benar-benar dapat mewujudkan cita-cita koperasi yaitu menyejahterakan anggotanya.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang

---

<sup>1</sup><http://diskop.padang.go.id/structural> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, 2006, *Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil*, Bandung : Nuansa Aulia, Jakarta, hlm.34

tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengawasan pada koperasi simpan pinjam oleh Dinas Koperasi dan UKM yang ada di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “**EFEKTIFITAS PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat efektifitas pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Padang?
2. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan dalam rangka mengefektifkan pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan dalam rangka mengefektifkan pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang.

## **II.METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis atau sering juga disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang sering terjadi di lapangan.
2. Sumber Data  
Sumber Data Terdiri dari Sumber Data

Primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi dan buku.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumentasi dan Wawancara<sup>3</sup> untuk memperoleh keterangandengan melakukan tanya jawab dan mempelajari peraturan perundang-undangan, artikel, literatur.

### **4. Teknik Analisis Data**

teknik Analisis data menggunakan Analisa Kualitatif. Yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor yang menghambat efektifitas pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang**

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, Disdagnakekop & UKM Kota Padang terdapat hambatan-hambatan meliputi:<sup>4</sup>

- a) Tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.
- b) Beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok.
- c) Kurangnya intensitas pembinaan oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang kepada koperasi-koperasi

### **B. Cara mengatasi hambatan dalam rangka mengefektifkan pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas**

---

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.143

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Adriansyah Pengawas Koperasi Ahli Muda di Dinas Koperasi da UKM Kota Padang Pada Tanggal 15 Januari 2024 Jam 09.30 Wib

### **Koperasi dan UKM di Kota Padang** Cara mengatasi hambatan:<sup>5</sup>

1. Untuk menangani ketidakdisiplinan pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun, Satuan Tugas Pengawasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dapat mengambil langkah-langkah berikut: Pertama, mereka dapat menghubungi koperasi yang bersangkutan untuk segera menyampaikan laporan RAT tahunan yang dikelola oleh pengurus koperasi tersebut.
2. Para pengurus koperasi sering menggunakan KTP palsu atau mengalihkan uang pinjaman dari masyarakat untuk kepentingan pribadi. Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar Undang-Undang.
3. Kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terhadap koperasi-koperasi merupakan kendala utama. Keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi faktor yang menghambat keaktifan satgas pengawasan Dinas Koperasi dan UKM..

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menjalankan tugas pengawasan terhadap koperasi dengan cara mengawasi perkembangan kegiatan koperasi secara teratur melalui peningkatan manajemen koperasi.
2. Dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di Kota

Padang. Satuan pengawasan koperasi menghadapi berbagai hambatan.

### **B. Saran**

1. Penting bagi satuan tugas pengawasan untuk menjalankan tugas mereka dengan tegas, karena kurangnya kontrol pengawasan dari pemerintah melalui satuan tugas tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, untuk masa depan, peluang terjadinya penyimpangan dalam koperasi simpan pinjam dapat diminimalkan
2. Untuk memastikan bahwa satuan tugas pengawasan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang beroperasi dengan maksimal, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait, termasuk pengurus, pengawas, pengelola, anggota, dan pemerintah setempat yang diwakili oleh Dinas Koperasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

- Ninik Widiyanti, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT.Rineke Cipta, Jakarta
- Mohammad Hatta, 1987, *Membangun Koperasidan Koperasi Membangun*, PT.Inti Idayu Press, Jakarta
- Ichsan Reza Nurul, Sarman Sinaga, Lukman Nasution, 2021, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, CV Sentosa Deli Pratama, Medan
- Sentosa Sembriring, 2006. *Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil*, Bandung : Nuansa Aulia, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya.
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta
- Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, 1996, *Kamus Indonesia-Arab*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Apriandi Pengawas Koperasi Ahli Muda di Dinas Koperasi da UKM Kota Padang Pada Tanggal 15 Januari 2024 Jam 08.30 Wib

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasiliatsi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016.

Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

## **C. SUMBER LAIN**

Bambang Suprianto, 2007, *Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai media pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Britannica Concise Encyclopedia, Volume 4 Nomor 2.

Syamsuri S.A, 2006, *Pendidikan Koperasi Sebagai Vektor Percepatan Pmebangunan Koprasi Indonesia*, *Jurnal pendidikan Ekonomi dan Koperasi Indonesia*, Vol 1, Nomor 1

<http://diskop.padang.go.id/struktural>

<http://diskop.padang.go.id/profil>

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terhadap semua pihak yang telah membantu dan metemani penulis dalam mengerjakan skripsi